



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis dan semakin kompleks dibutuhkan penanganan intensif dari pemerintah. Maksud dari penanganan intensif ini adalah pemerintah berupaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dengan cara menciptakan ketahanan nasional dalam bidang, idiologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Upaya tersebut diimplementasikan pemerintah salah satunya melalui pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam mempengaruhi perilaku dan karakteristik bangsa agar arah berkembang



sesuai dengan arah dan tujuan Negara dan mampu menjawab permasalahan masyarakat.

Urusan utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah menjalankan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan terwujudnya kondisi stabilitas politik dan keamanan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang kondusif maka, pemerintah daerah dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan lancar sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program dan kebijakan pemerintah optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kesatuan Bangsa, Seksi Politik dan Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik.

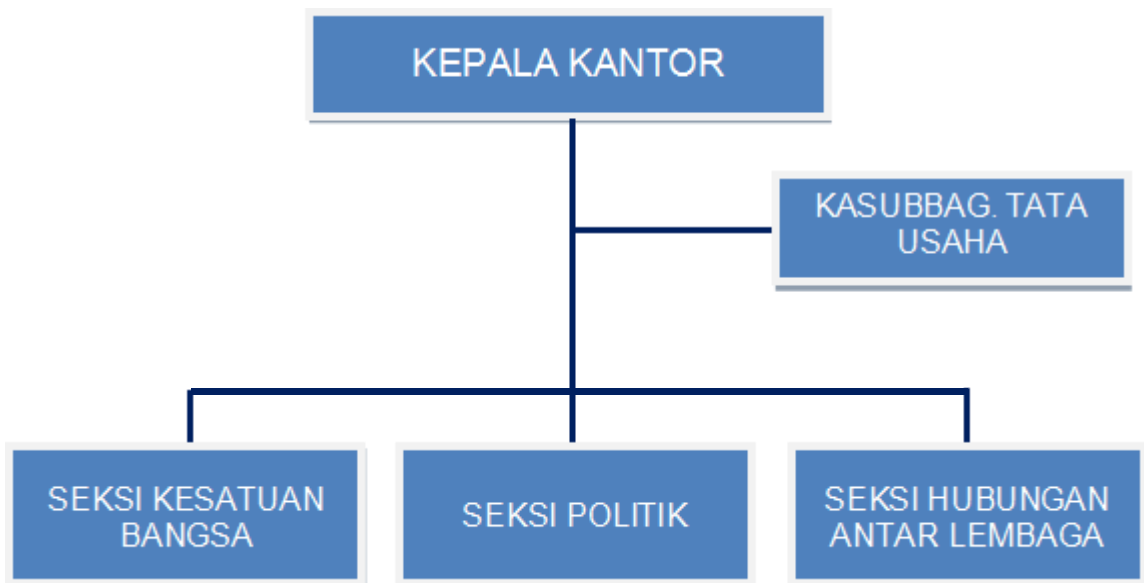
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga; dan
- e. Pelayanan administratif di kantor kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh MUZAKAR, S.E. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



D. Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan



mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

E. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah



sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Secara khusus Visi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tidak ada namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah mendukung untuk



mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022 adalah **“TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”**.

2. Misi

Sedangkan keterlibatan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022 tersebut diatas adalah dengan Misi ke-5 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu “Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja



Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun
2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	%		Jumlah konflik SARA yang terselesaikan	
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	%		Jumlah konflik politik yang ditangani	

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan



perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Lampung Barat
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	100

Perencanaan Strategis Hasil Reviu



Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021, sebagai berikut :

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Misi ke-5 (lima) Kabupaten Lampung Barat tersebut mempunyai Tujuan sebagai berikut : - Terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera. Sedangkan indikator tujuannya adalah persentase konflik SARA yang terselesaikan.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	%		Jumlah konflik SARA yang terselesaikan		
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	%		Jumlah konflik politik yang ditangani		



Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	%	100
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	%	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :



**Pencapaian Kinerja Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :



- Sasaran 1 yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan, terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase konflik SARA yang terselesaikan.
- Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik, terdiri dari 1 indikator yaitu Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melalui Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	%	100	100	100
2	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	%	100	100	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase konflik SARA yang terselesaikan.

Pencapaian target indikator persentase konflik SARA yang terselesaikan tercapai sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%. Kondisi ini disebabkan antara lain pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) potensi konflik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kedua potensi/gejala konflik tersebut antara lain :

a. Pendirian rumah ibadah (Vihara) di Pemangku Bedeng, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Bali Bukit.

Masyarakat sekitar menolak untuk diraknnya rumah ibadah tersebut dengan alasan tidak ada satupun masyarakat sekitar yang memeluk agama Konghucu/Budha, yang mau mendirikan Vihara bukan warga masyarakat Pekon Padang Cahya, Status tanah yang akan didirikan rumah ibadah tersebut tidak diketahui oleh aparat Pekon Keabsahannya. Perangkat Kecamatan dan Pekon akan menindaklanjuti pembangunan



rumah ibadah asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/seluruh kriteria persyaratan terpenuhi.

- b. Penguasaan lahan hutan lindung oleh warga masyarakat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya.**

Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya adalah pekon definitif yang telah ditetapkan pada tahun 1954. Pekon ini lahir dan berkembang dari program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional), dimana pada tahun 1951-1952 sebanyak 250 KK atau sekitar 680 jiwa dari daerah Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya) ditransmigrasikan ke daerah ini. Seiring dengan perkembangannya saat ini di Pekon Sukapura telah bermukim sekitar 679 KK atau sekitar 1629 jiwa. Demikian juga dengan kondisi desanya telah banyak mengalami perkembangan. Pemukiman, sarana dan prasarana umum (seperti Sekolah Dasar pasar) telah berdiri, bahkan lahan kawasan hutan seluas 50 ha telah dialih fungsikan menjadi areal perumahan karyawan PLTA Way Besay dengan mekanisme tukar guling.

Pada tahun 1994 sesuai dengan kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), sebagian wilayah pekon masuk ke dalam wilayah Hutan Lindung (Register 45B Bukit Rigis), termasuk areal pemukiman penduduk. Dengan adanya kebijakan tersebut meka masalah kepastian hak penguasaan lahan (land tenure) mengemuka. Hal ini menyebabkan masyarakat Pekon Sukapura merasa perlu untuk mendapatkan kejelasan status pemukiman dan lahan mereka. Mengingat kenyataan sejarah dan fakta dilapangan masyarakat menginginkan areal pemukiman mereka dikeluarkan dari kawasan hutan lindung.

Sejak mengemukanya permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menangani permasalahan tersebut sebagai upaya untuk menyelesaikannya, namun demikian keputusan akhir atas selesainya koflik ini ada dipemerintah pusat.



2. Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan

Kondisi Kabupaten Lampung Barat yang kondusif sangat mendukung untuk terciptanya kondisi wilayah yang aman dan tenteram dengan demikian konflik terkait permasalahan politik di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang mengakibatkan pertikaian dan keributan antar warga masyarakat nyaris tidak ada jika pun ada permasalahan akan diselesaikan segera secara musyawarah antar warga sehingga tidak konflik membesar.

Terjadinya konflik secara umum disebabkan karena tiga faktor yaitu motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya sikap kurang saling menghormati antar warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Motif ekonomi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik karena adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.

Selain itu, konflik-konflik yang berkelanjutan, berkepanjangan, atau konflik akumulatif, baik yang terjadi pada konflik horizontal maupun vertikal, memiliki beberapa karakteristik yang sama dan dapat dibagi dalam tiga kategori utama. Pertama, konflik terjadi di suatu tempat yang sama dengan aktor yang sama. Kedua, konflik terjadi di tempat yang berbeda dengan aktor yang sama. Ketiga, konflik terjadi di tempat yang berbeda dengan aktor yang berbeda, yang pada dasarnya bersumber pada masalah yang sama. Konflik-konflik ekspresif dan instrumental juga memiliki karakter berdasarkan ketiga kategori tersebut



3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, dari sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun
2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	%	100	100	100%
2	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	%	100	100	100%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :



Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun
2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0.00 %
2	Sesuai Target	100 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Dari sebanyak 1 (satu) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

NO	MISI	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET		SESUAI TARGET		BELUM MENCAPAI TARGET	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Misi 1	2	0	0.00	2	100	0	0.00
	Jumlah	2	0	0.00	2	100	0	0.00

Dari sebanyak 1 (satu) sasaran dengan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja, pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	100 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	%	100%	-	0.00	100%	99,00	99.00	100	100	100.00	100	100	0.00



Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase konflik SARA yang terselesaikan" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase konflik SARA yang terselesaikan" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kinerjanya mencapai 100%.



Sasaran 2

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	%	100%		0.00	100%	99,97	99.00	100	100	100.00	100	100	0.00



Sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan" adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke-4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik maka capaian kerjanya mencapai 100%.

3.4 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Serapan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja

Dari keseluruhan anggaran belanja operasional (termasuk didalamnya belanja gaji dan tunjangan PNS) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebesar **Rp. 4,937,111,352.-**(*empat milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) dan terealisasi sebesar 96,94% atau sebesar **Rp. 4,786,161,752,-**(*empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*), dengan demikian dapat diketahui bahwa selama periode 2021 alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di atas 96,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2018-2022 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program



dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

- Indikator kinerja Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan, didukung oleh Program :
 - 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan yang dalam pelaksanaan program tersebut, prosentase anggaran yang terserap sebanyak 91,82% dari pagu anggaran yang dialokasikan dan menghasilkan outcome kinerja sebesar 100% dari target 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja yaitu $100\% - 91,82\% = 8,18\%$.
 - 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang dalam pelaksanaan program tersebut, prosentase anggaran yang terserap sebanyak 97,99% dari pagu anggaran yang dialokasikan dan menghasilkan outcome kinerja sebesar 100% dari target 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja yaitu $100\% - 97,99\% = 2,01\%$.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	%	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
Indikator kinerja Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100	100	100	1,642,951,155,-	1,603,801,100,-	97,62



- Indikator Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik, didukung oleh Program :
- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang dalam pelaksanaan program tersebut, prosentase anggaran yang terserap sebanyak 98,68% dari pagu anggaran yang dialokasikan dan menghasilkan outcome kinerja sebesar 100% dari target 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja yaitu $100\% - 98,68\% = 1,32\%$.
 - 2) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dalam pelaksanaan program tersebut, prosentase anggaran yang terserap sebanyak 96,99% dari pagu anggaran yang dialokasikan dan menghasilkan outcome kinerja sebesar 100% dari target 100% sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja yaitu $100\% - 96,99\% = 3,01\%$.

INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	%	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
Indikator Kinerja Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	100	100	100	2,005,232,872,-	1,964,178,003,-	97,98



**TARGET DAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2021)	
			4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	1 Bidang	1,288,927,325	1 Bidang	1,218,182,649
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	10 Dok	29,306,600	10 Dok	29,306,600
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	3 Dok	2,749,000	3 Dok	2,749,000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	1 Dok	5,649,000	1 Dok	5,649,000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	1 Dok	4,480,000	1 Dok	4,480,000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4,822,400	1 Dok	4,822,400
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dok	3,933,000	1 Dok	3,933,000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	5,129,000	1 Dok	5,129,000



1	2	3	4	5	6	7
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dok	2,544,200	2 Dok	2,544,200
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	16 Dok	659,747,665	16 Dol	606,127,233
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji yang terbayar	6 Orang	651.467.665	7 Orang	597.847.233
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	3,000,000	1 Dok	3,000,000
2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Dok	1,480,000	4 Dok	1,480,000
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dok	1,400,000	2 Dok	1,400,000
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dok	2,400,000	2 Dok	2,400,000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	6 Orang	9,000,000	6 Orang	5,250,000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Orang	9,000,000	6 Orang	5,250,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub organisasi yang melaksanakan administrasi umum	5 Sub Organisasi	182,566,600	5 Sub Organisasi	182.410.173
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Alat-Alat Listrik dan Elektronik	12 Jenis	6,780,600	12 Jenis	6,780,600
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	8 Jenis	22,630,000	8 Jenis	22,630,000



Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

1	2	3	4	5	6	7
4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	4 SKHU	4,080,000	4 SKHU	4,080,000
4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis makan minum tamu	7 Jenis	4,428,000	7 Jenis	4,428,000
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Paket	144,648,000	30 Paket	144.491.573
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	31 Unit	139,110,500	31 Unit	135.910,500
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional anak-anak	1 Unit	23,510,000	1 Unit	20.310.000
5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleu yang diadakan	9 Unit	42,600,000	9 Unit	42,600,000
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan	21 Unit	73,000,500	21 Unit	73,000,500
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemda	3 Sub Organisasi	141,429,320	3 Sub Organisasi	136.209.153
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan Jumlah surat keluar	1000 Surat	3,450,000	1,785 Surat	3,450,000
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Rek	16,250,000	16 Rek	11.030.333
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sub organisasi yang melaksanakan administrasi umum	4 Sub Organisasi	121,729,320	16 Sub Organisasi	121.728.820
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	18 unit	127,766,640	18 Unit	122.968.990
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	5 unit	47,793,000	5 unit	45.335.990



1	2	3	4	5	6	7
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	9,225,000	12 Unit	9,225,000
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	70,748,640	1 Gedung	68.408,000
II	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100 %	100,000,000	90.91 %	91,815,000
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta kegiatan	100 %	100,000,000	90.91 %	91,815,000
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta revitalisasi dan aktualisasi	100 Orang	100,000,000	100 Orang	91,815,000
III	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks demokrasi	78 sedang	1,140,185,872	312 sedang	1.125.185.003



1	2	3	4	5	6	7
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik dan jumlah berkas verifikasi	110 Orang, partai	1,140,185,872	174 Orang, partai	1.125.185.003
1.1	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta Diskusi Politik dan sosialisasi politik	100 Orang	99,694,600	150 Orang	98.514.200
1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Berkas Partai Politik Penerima Bantuan keuangan yang diverifikasi	10 Dok	1,040,491,272	24 Dok	1.026.670.803



1	2	3	4	5	6	7
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	100 %	865,047,000	100 %	838.993.000
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan jumlah buku	260 Buku, Orang	865,047,000	260 Buku, Orang	838.993.000
1.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah buku	100 Buku	35,970,000	100 Buku	35.886.600
1.2	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas penerima Bantuan Jumlah peserta forum silaturahmi ormas	160 Orang	829,077,000	160 Orang	803.106.400
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100 %	1,542,951,155	307 %	1.511.986.100
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan	30 laporan	1,542,951,155	30 laporan	1.511.986.100



1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Forkompinda	12 laporan	1,459,648,955	12 laporan	1.428.958.900
1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan Tim Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/WNA	18 laporan	83,302,200	18 laporan	83.027.200
TOTAL				4,937,111,352,-		4,786,161,752,-

Tabel. 3.8
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100	97,62	2,38
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Persentase kasus konflik terkait politik yang terselesaikan	100	97,98	2.02
Jumlah Total Efisieni				4,4
Rata-rata efisiensi per indikator				2,2



Dari uraian pada table diatas tergambar kondisi pencapaian indicator kinerja sasaran tingkat capaiannya 100% sesuai dengan target dan juga terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,4%.

b. Efisiensi Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terhadap Pencapaian Kinerja.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM Aparatur yang memadai, saat ini SDM yang tersdia pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 7 orang.

1) Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan.

No.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	2 orang
4.	Penata	III/c	1 orang
5.	Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
6.	Pengatur	II/c	1 orang
TOTAL			7 orang

2) Jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana (S2)	1 orang
2.	Sarjana (S1)	4 orang
3.	Diploma III	1 orang
4.	SMA/SMK/Sederajat	1 orang
TOTAL		7 orang



3) Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan

No.	JENIS JABATAN	JUMLAH
1.	Jabatan Struktural	5 orang
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	-
3.	Jabatan Fungsional Umum	2 orang
4.	Non Jabatan	-
TOTAL		7 orang

c. Efisiensi Kinerja Terhadap Ketersediaan Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik cenderung terbatas, namun pelaksanaan tugas dan fungsi tetap dilaksanakan secara maksimal guna mencapai target program dan kegiatan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Barang	Ukuran/ CC	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Toyota Kijang Kapsul	1781	2003	1 unit	Baik
2	Motor Honda CB150 Verza CW	150	2021	1 Unit	Baik
3	Motor TS 125	125	2003	1 unit	Baik
4	Motor Honda MCB Win	97	2004	1 unit	Baik
5	Motor Suzuki A 100		1994	1 unit	Rusak
6	Genset 5000 w	5000 watt	2005	1 unit	Rusak
7	Meja Biro	1 Biro	2008	4 bh	Baik
8	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	1 bh	Baik
9	Meja Biasa	½ Biro	1992	2 bh	Baik
10	Meja Biasa	½ Biro	1992	1 bh	Baik
11	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	7 bh	Baik
12	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	2 bh	Baik
13	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	5 bh	Baik
14	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
15	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik



1	2	3	4	5	6
16	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	1 bh	Baik
17	Meja ½ Biro	½ Biro	2003	1 bh	Baik
18	Meja ½ Biro	½ Biro	2006	1 bh	Baik
19	Meja Kerja ½ Biro	½ Biro	2008	2 bh	Baik
20	Kursi Biro	1 Biro	1992	1 bh	Baik
21	Kursi Biro	1 Biro	1992	1 bh	Baik
22	Kursi Biro	Biro	1992	1 bh	Baik
23	Kursi Putar 1 Biro	1 Biro	2008	3 bh	Baik
24	Kursi Putar	½ Biro	1992	1 bh	Baik
25	Kursi Putar Besar		1992	1 bh	Baik
26	Kursi Putar		1992	2 bh	Baik
27	Kursi Putar		1992	1 bh	Baik
28	Kursi Putar ½ Biro		2008	5 bh	Baik
29	Kursi Lipat	Standart	2001	3 bh	Baik
30	Kursi Lipat	Standart	2005	2 bh	Baik
31	Kursi Lipat	Standart	2005	2 bh	Baik
32	Kursi Rapat	Standart	2008	10 bh	Baik
33	Kursi Tamu		2007	1 set	Baik
34	Sofa/Sice		2008	1 set	Baik
35	Papan Kegiatan		1992	1 bh	Baik
36	Papan Data		1999	1 bh	Baik
37	Komputer		2007	2 bh	Baik
38	Komputer Notebook		2008	1 bh	Baik
39	Filling Kabinet Kantor		2007	2 bh	Baik
40	Filling Kabinet		2008	6 bh	Baik
41	Cermin		1992	1 bh	Baik
42	Lemari Besi		2008	6 bh	Baik
43	Mesin Tik		1999	1 bh	Baik
44	Mesin Tik		2008	1 bh	Baik
45	Brankas		2008	1 bh	Baik
46	Meja Komputer		2001	1 bh	Baik
47	Dispenser		2001	1 bh	Baik
48	Hordeng		2004	2 bh	Baik
49	Hordeng		2004	2 bh	Baik



1	2	3	4	5	6
50	Hordeng		2004	4 bh	Baik
51	Hordeng		2004	2 bh	Baik
52	Hordeng		2004	6 bh	Baik
53	Hordeng		2004	2 bh	Baik
54	Teralis		2004	6	Baik
55	Teralis		2004	3	Baik
56	Teralis		2004	6	Baik
57	Teralis		2004	3	Baik
58	Teralis		2004	9	Baik
59	Teralis		2004	4	Baik
60	Gambar Bupati/Wakil		2004	1 bh	Baik
61	Foto Presiden/Wakil		2005	1 bh	Baik
62	Foto Gubernur/Wakil		2005	1 bh	Baik
63	Pesawat Fax		2004	1 bh	Baik
64	Mesin Faximile		2008	1 bh	Baik
65	Meja Rapat		2008	1 bh	Baik
66	Lemari Buku		2008	1 bh	Baik
67	White Board		2008	1 bh	Baik
68	Papan Data Linmas		2008	1 bh	Baik
69	Papan Data Ormas & LSM		2008	1 bh	Baik
70	Komputer SIPKD	Core i-3	2010	1 unit	Baik
71	Printer SIPKD	Laser Jet	2010	1 unit	Baik
72	Komputer PC	Dual core	2012	2 unit	Baik
73	Komputer Notebook	Core i-3	2012	1 unit	Baik
74	White Board		2012	1 unit	Baik
75	Pesawat Telepon		2001	1 bh	Baik
76	Handycam		2007	1 bh	Baik
77	Wearless		2007	1 bh	Baik
78	Standart (Tripod Corong)		2008	1 bh	Baik
79	Kamera Digital	16 MP	2012	1 unit	Baik
80	Komputer PC	Dual core	2013	1 unit	Baik
81	Lemari Arsip	Besi	2016	4 unit	Baik
82	Kursi Lipat	Besi	2016	25 unit	Baik
83	Komputer PC Build Up	Core i-3	2016	2 unit	Baik



1	2	3	4	5	6
84	Cabinet 4 laci	Besi	2017	2 unit	Baik
85	Komputer PC Build Up	Core i-3	2017	1 unit	Baik
86	Komputer Notebook/Laptop	Core i-5	2017	1 unit	Baik
87	Kursi 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
88	Kursi ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
89	Meja 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
90	Meja ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
91	Mesin Tik	Manual	2017	1 unit	Baik
92	Meja Resepsionis		2021	1 unit	Baik
93	Kursi Lipat		2021	6 unit	Baik
94	Kursi	1 Biro	2021	1 unit	Baik
95	Proyektor		2021	1 unit	Baik
96	Layar Proyektor		2021	1 unit	Baik
97	Televisi		2021	1 unit	Baik
98	Gorden		2021	24 Meter	Baik
99	Tangga Lipat		2021	1 unit	Baik
100	UPS Komputer		2021	1 Unit	Baik
101	Mic Wireless Conferece		2021	1 Unit	Baik
102	Genset		2021	1 unit	Baik
103	Laptop	Asus	2021	1 unit	Baik

3.5. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

Program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana karena adanya dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) kegiatan, dengan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 4.937.111.352,-** (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 4.799,942,221,-** (*empat miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh*



dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 97,22% dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, program ini dijabarkan dalam 6 (enam) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 1,288,927,325,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terserap sebesar **Rp.1,218,182,649,-** atau 94,51%, ada kegiatan yang terealisasi 100% seperti kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sedangkan 5 kegiatan lainnya tidak terealisasi 100% sesuai dengan target kinerja, dimana pengeluaran disesuaikan dengan real costnya. dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan ini dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 29,306,600,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terserap sebesar **Rp.29,306,600,-** atau 100%, dengan indikator jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 10 dokumen tercapai target 100%.

Pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdapat 7 Sub Kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 2,749,000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun sebesar 3 dokumen sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 2,749,000,-)	Rp. 2,749,000,-	Rp. 2,749,000,- (100%)
Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	3 dokumen	3 dokumen
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	bidang urusan

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Pada sub kegiatan inipagu anggaran terealisasi sebesar **Rp.5.649.000,-** atau 100%, serta pada indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 5,649,000,-)	Rp. 5,649,000,-	Rp. 5,649,000,- (100%)
Output	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	bidang urusan

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 4.480.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 4.480.000)	Rp. 4.480.000,-	Rp. 4.480.000,- (100%)
Output	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	bidang urusan



d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp.4.822.400,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyusunan dokumen DPA-SKPD yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 4.822.400)	Rp. 4.822.400,-	Rp. 4.822.400,- (100%)
Output	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp.3.933.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 3.933.000)	Rp. 3.933.000,-	Rp. 3.933.000,- (100%)
Output	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp.5.129.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 5.129.000)	Rp. 5.129.000,-	Rp. 5.129.000,- (100%)
Output	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp.2.544.200,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sebesar 2 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 2.544.200)	Rp. 2.544.200,-	Rp. 2.544.200,- (100%)
Output	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan ini jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.644.067.574,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp.606.127.233,-** atau 91,87 persen, serta pada indikator jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sebesar 6 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 5 (Lima) Sub Kegiatan, yaitu :



a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 635.787.574,-** terealisasi sebesar **Rp.597.847.233,-** atau 91,77 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun sebesar 6 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 635.787.574)	Rp. 635.787.574,-	Rp. 597.847.233,- (91.77%)
Output	Gaji yang terbayar	6 dokumen	6 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 3.000.000)	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,- (100%)
Output	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 1.480.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun sebesar 4 dokumen sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1.480.000)	Rp. 1.480.000,-	Rp. 1.480.000,- (100%)
Output	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 dokumen	4 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp.1.400.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun sebesar 2 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1.400.000)	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.400.000,- (100%)
Output	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 2.400.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun sebesar 2 dokumen sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 2.400.000)	Rp. 2.400.000,-	Rp. 2.400.000,- (100%)
Output	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	2 dokumen (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.17.000.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp.5.250.000** atau 58,33 persen, serta pada indikator jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 (Satu) Sub Kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 17.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.250.000,-** atau 58,33 persen, serta pada indikator jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang disusun 3 Orang sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 17.000.000)	Rp. 17.000.000,-	Rp. 5.250.000,- (58,33%)
Output	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	3 Orang (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ini jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 182.566.600,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp. 182.410.173,-** atau 99,91 persen, serta pada indikator jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 5 (Lima) Sub Kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 6.780.600,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disusun sebesar 12 Jenis sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 6.780.600,-)	Rp. 6.780.600,-	Rp. 6.780.600,- (100%)
Output	Jumlah jenis Alat-Alat Listrik dan Elektronik	12 Jenis	12 Jenis (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 22.630.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disusun sebesar 8 jenis sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 22.630.000,-)	Rp. 22.630.000,-	Rp. 22.630.000,- (100%)
Output	Jumlah jenis Alat-Alat Listrik dan Elektronik	8 Jenis	8 Jenis (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 4.080.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganyang disusun sebanyak 4 SKHU sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 4.080.000,-)	Rp. 4.080.000,-	Rp. 4.080.000,- (100%)
Output	Jumlah SKHU	4 SKHU	4 SKHU (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 4.428.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disusun sebanyak 7 jenis sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 4.428.000,-)	Rp. 4.428.000,-	Rp. 4.428.000,- (100%)
Output	Jumlah jenis makan minum tamu	7 Jenis	7 Jenis (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 144.648.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 144.491.473** atau 99,89 persen, serta pada indikator jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun sebanyak 30 paket sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 144.648.000,-)	Rp. 144.648.000,-	Rp. 144.491.473,- (100%)
Output	Jumlah paket perjalanan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Paket	30 Paket (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah inipagu anggaran sebesar **Rp. 139.110.500,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp. 135.910.500** atau 97,70 persen, serta pada indikator jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 23.510.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 20.310.000** atau 86,39 persen, serta pada indikator jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau



Lapangan yang disusun sebanyak 1 unit sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 23.510.000,-)	Rp. 23.510.000,-	Rp. 20.310.000,- (86,39%)
Output	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas/Operasionalsanakan	1 Unit	1 Unit (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 42.600.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Pengadaan Mebel yang disusun sebanyak 9 unit sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 42.600.000,-)	Rp. 42.600.000,-	Rp. 42.600.000,- (100%)
Output	Jumlah meubeleur yang diadakan	9 Unit	9 Unit (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 73.000.500,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disusun sebanyak 21 unit sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 73.000.500,-)	Rp. 73.000.500,-	Rp. 73.000.500,- (97,70%)
Output	Jumlah peralatan yang disediakan	21 Unit	21 Unit (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah inpagu anggaran sebesar **Rp. 141.429.320,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp.136.209.153,-** atau 96.31 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 4 (Empat) Sub Kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan inpagu anggaran sebesar **Rp. 73.000.500,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disusun sebanyak 21 unit sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 73.000.500,-)	Rp. 73.000.500,-	Rp. 73.000.500,- (97,70%)
Output	Jumlah peralatan yang disediakan	21 Unit	21 Unit (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada sub kegiatan inpagu anggaran sebesar **Rp. 3.450.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun sebanyak 100 surat sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 3.450.000,-)	Rp. 3.450.000,-	Rp. 3.450.000,- (97,70%)
Output	Jumlah surat masuk dan Jumlah surat keluar	100 Surat	100 Surat (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 16.250.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 11.030.333** atau 67.88 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disusun sebanyak 4 rekening sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 16.250.000,-)	Rp. 16.250.000,-	Rp. 11.030.333,- (67.88%)
Output	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Rek	4 Rek (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 121.729.320,-** terealisasi sebesar **Rp.121.728.820,-** 100 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun sebanyak 4 sub organisasi sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 121.729.320,-)	Rp. 121.729.320,-	Rp. 121.728.820,- (97,70%)
Output	Jumlah sub organisasi yang melaksanakan administrasi umum	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah inipagu anggaran sebesar **Rp.127.766.240,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp. 122.968.990** atau 96.24 persen, serta pada indikator jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 47.793.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 45.335.990,-** atau 94.68 persen, serta pada indikator jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disusun sebanyak 5 unit sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 47.793.000,-)	Rp. 47.793.000,-	Rp. 45.335.990,- (94.68 %)
Output	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	5 Unit	5 Unit (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 9.225.000,-** terealisasi sebesar 100 persen, serta pada indikator jumlah



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disusun sebanyak 12 unit sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 9.225.000,-)	Rp. 9.225.000,-	Rp. 9.225.000,- (100 %)
Output	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit	12 Unit (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 70.748.640,-** terealisasi sebesar **Rp. 68.408.000,-** atau 96.96 persen, serta pada indikator jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disusun sebanyak 1 gedung sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 70.748.640,-)	Rp. 70.748.640,-	Rp. 68.408.000,- (96.96%)
Output	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung (100%)
Outcome	Jumlah Bidang Urusan Yang dilaksanakan	1 bidang urusan	1 bidang urusan

➤ **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 100.000.000,-**



dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terserap sebesar Rp. **91.815.000,-** atau 91.82%.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini pagu anggaran sebesar **Rp.127.766.240,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp. 122.968.990** atau 96.24 persen, serta pada indikator jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sebesar 1 dokumen sesuai dengan target kinerja

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 100.000.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar **Rp. 91.815.000** atau 91.82 dengan realisasi indikator kinerja kegiatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan revitalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebanyak 110 peserta.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 100.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 91.815.000** atau 91.82 persen, serta pada indikator jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang sebanyak 110 orang sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 100.000.000,-)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 91.815.000,- (91.82 %)
Output	Jumlah peserta revitalisasi dan aktualisasi	110 Orang	110 Orang
Outcome	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan meningkat	100%	90.91%

➤ **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.**

Dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.1.140.185.172** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terserap sebesar **Rp. 1.125.185.003** atau 98.68%, semua kegiatan terealisasi 100% dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 1.140.185.872,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.125.185.003** atau 98.68 persen, serta pada indikator jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,



Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan indicator kinerja kegiatan berupa jumlah peserta yang mengikuti diskusi public sebanyak 100 peserta dan pelaksanaan verifikasi berkas partai politik penerima bantuan keuangan sebanyak 10 partai politik

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1.148.185.872,-)	Rp. 1.148.185.872,-	Rp. 1.125.185.003,- (98.68%)
Output	Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik dan jumlah berkas verifikasi	100 Orang dan 10 Parpol	100 Orang dan 10 Parpol
Outcome	Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100 Orang dan 10 Parpol	100 Orang dan 10 Parpol

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 99.694.600,-** terealisasi sebesar **Rp. 98.514.200** atau 98.82 persen, serta pada indikator jumlah Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun sebanyak 100 orang partai sesuai dengan target kinerja.



Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 99.694.600,-)	Rp. 99.694.600,-	Rp. 98.514.200,- (98.82%)
Output	Jumlah peserta Diskusi Politik dan sosialisasi politik	100 Orang Partai	100 Orang Partai
Outcome	Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100 Orang dan 10 Parpol	100 Orang dan 10 Parpol

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 1.040.491.272,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.026.670.803** atau 98.82 persen, serta pada indikator jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang disusun sebesar 10 dokumen sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1.040.491.272,-)	Rp. 1.040.491.272,-	Rp. 1.026.670.803,- (98.82%)
Output	Jumlah Berkas Partai Politik Penerima Bantuan keuangan yang diverifikasi	10 Dokumen Parpol	10 Dokumen Parpol
Outcome	Jumlah peserta diskusi dan sosialisasi politik serta jumlah berkas parpor yang diverifikasi	100 Orang dan 10 Parpol	100 Orang dan 10 Parpol

➤ **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**



Dalam Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 865.047.000,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terserap sebesar **Rp.838.993.000** atau 96.99 persen, semua kegiatan terealisasi 100% dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 865.047.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 838.993.000** atau 96.99 persen, serta pada indikator jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun sebanyak 100 buku dan sebanyak 160 orang mengikuti forum silaturahmi ormas sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 865.047.000,-)	Rp. 865.047.000,-	Rp. 838.993.000,- (96.99%)
Output	jumlah pembinaan dan jumlah buku	100 Buku, 160 Orang	100 Buku, 160 Orang
Outcome	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	100%	100%

a. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada sub kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 35.970.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 35.886.600** atau 99.77 persen, serta pada



indikator jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun sebesar 100 buku sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 35.970.000,-)	Rp. 35.970.000,-	Rp. 35.886.600,- (99.77%)
Output	Jumlah buku	100 Buku	100 Buku
Outcome	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	100%	100%

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 829.077.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 803.106.400** atau 96.87 persen, serta pada indikator jumlah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan target peserta yang mengikuti forum silaturahmi ormas sebanyak 160 orang sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 829.077.000,-)	Rp. 829.077.000,-	Rp. 803.106.400,- (96.87%)
Output	Jumlah Ormas penerima Bantuan Jumlah peserta forum silaturahmi ormas	160 Orang	160 Orang
Outcome	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	100%	100%



➤ **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

Dalam Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Lampung Barat, program ini dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar **Rp. 1.542.951.155,-** dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 terserap sebesar **Rp. 1.511.986.100** atau 97.99 persen, semua kegiatan terealisasi 100% dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar **Rp. 1.542.951.155,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.511.986.100** atau 96.99 persen, serta pada indikator jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial realisasi kinerja yang terealisasi sebanyak 30 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1.542.951.155,-)	Rp. 1.542.951.155,-	Rp. 1.511.986.100,- (96.99%)
Output	Jumlah laporan	30 Laporan	30 Laporan
Outcome	Persentase peningkatan penanganan konflik sosial	100%	100%

- a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**



Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 1.459.648.955,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.428.958.900** atau 97.90 persen, serta pada indikator jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah realisasi kinerja yang dicapai sebesar 12 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 1.459.648.955,-)	Rp. 1.459.648.955,-	Rp. 1.428.958.900,- (97.90%)
Output	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Forkompinda	12 Laporan	12 Laporan
Outcome	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	100%	100%

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Pada sub kegiatan inipagu anggaran sebesar **Rp. 83.302.200,-** terealisasi sebesar **Rp. 83.027.200** atau 99.67 persen, serta pada indikator jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah



realisasi kinerja yang dicapai sebesar 18 laporan sesuai dengan target kinerja.

Uraian	Uraian	Target	Capaian
Input	Anggaran Kegiatan (Rp. 83.302.200,-)	Rp. 83.302.200,-	Rp. 83.027.200,- (96.87%)
Output	Jumlah laporan Tim Koordinasi Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah/WNA	18 Laporan	18 Laporan
Outcome	Persentase peningkatan organisasi formal dan nonformal yang bermitra dengan pemerintah	100%	100%



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 4,937,111,352,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 4,786,161,752,-** dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Kantor



Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa **Rp. 150,949,600,-**

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 4 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 4,786,161,752,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah 97,22 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,

MUZAKAR, S.E.
NIP. 196605121988031004